



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01.401968
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI**

**2
0
2
3**



**UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



Jalan Pulau Bangka, Padang Baru
Prov. Kep. Bangka Belitung 33684



(0717) 9111513



info@ptun-pangkalpinang.go.id



www.ptun-pangkalpinang.go.id

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 401968**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

PANGKALPINANG - Babel

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	08
A. Penjelasan Umum.....	08
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	08
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	09
A.3. Basis Akuntansi.....	09
A.4. Dasar Pengukuran.....	09
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Pendapatan.....	19
B.2. Belanja.....	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	22
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	22
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	22
C.3. Persediaan.....	22
C.4. Tanah.....	24
C.5. Peralatan dan Mesin.....	24
C.6. Gedung dan Bangunan.....	24
C.7. Aset Tetap Lainnya.....	25
C.8. Akumulasi Penyusutan.....	25

C.9.	Aset Lainnya.....	25
C.10.	Uang Muka dari KPPN.....	26
C.11.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan.....	26
C.12.	Ekuitas.....	26
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	27
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	27
D.2.	Beban Pegawai.....	28
D.3.	Beban Persediaan.....	28
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	29
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	30
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	30
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	31
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	31
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	32
E.1.	Ekuitas Awal.....	32
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	32
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	32
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	32
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	33
E.5.	Ekuitas Akhir.....	33
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	34
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	34
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	34
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Terpadu, Pangkalpinang - BABEL

Telp. 0717-911151, e-mail : pangkalpinang@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan SEMESTER I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan SEMESTER I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan SEMESTER I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 2.170.837.321,-** atau mencapai **47,82 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 4.539.310.000,-**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 30 Juni 2023 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 30.308.610.661,-

yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 44.301.779,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 30.264.308.882,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 241.933.899,-

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 30.066.676.762,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar **Rp 30.308.610.661,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.274.568.464,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.274.568.464,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa bernilai Rp 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) - LO sebesar **(Rp. 3.274.568.464,-)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 31.153.039.155,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 3.274.568.464,-), kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.188.206.071,- menghasilkan penurunan ekuitas sebesar Rp. 1.086.362.393,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai **Rp. 30.066.676.762,-**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian seluruh Laporan keuangan mulai dari Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(dalam satuan Rupiah)**

NO	URAIAN	2023			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0
B	BELANJA				0
	BELANJA PEGAWAI	3,315,521,000	1,689,403,080	1,626,117,920	51
	BELANJA BARANG	1,208,789,000	466,884,241	1,626,117,920	39
	BELANJA MODAL	15,000,000	14,550,000	450,000	97
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,539,310,000	2,170,837,321	2,368,472,679	47,82
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.400.000	0	38.400.000	0
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	0	1.248.750	(1.248.750)	(100,00)
Persediaan	5.901.779	444.500	5.457.279	1.227,73
JUMLAH ASET LANCAR	44.301.779	1.693.250	42.608.529	2.516,38
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0
Peralatan dan Mesin	7.057.970.407	7.023.570.407	34.400.000	0,49
Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	26.464.419.989	0	0
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0
Akumulasi Penyusutan	(3.283.579.514)	(2.346.967.804)	(936.611.710)	39,91
JUMLAH ASET TETAP	30.264.308.882	31.166.520.592	(902.211.710)	(2,89)
Aset Lain-lain	20.290.000	20.290.000	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(20.290.000)	(19.260.000)	(1.030.000)	5,35
JUMLAH ASET LAINNYA	0	1.030.000	(1.030.000)	(100,00)
JUMLAH ASET	30.308.610.661	31.169.243.842	(860.633.181)	(2,76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	182.799.675	16.204.687	166.594.988	1.028,07
Utang yang Belum Ditagihkan	20.734.224	0	20.734.224	0
Uang Muka dari KPPN	38.400.000	0	38.400.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241.933.899	16.204.687	225.729.212	1.392,99
JUMLAH KEWAJIBAN	241.933.899	16.204.687	225.729.212	1.392,99
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30.066.676.762	31.153.039.155	(1.086.362.393)	(3,49)
JUMLAH EKUITAS	30.066.676.762	31.153.039.155	(1.086.362.393)	(3,49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30.308.610.661	31.169.243.842	(860.633.181)	(2,76)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.274.568.464)	(2.667.932.759)	(606.635.705)	22,738
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.274.568.464)	(2.667.932.759)	(606.635.705)	22,738
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.274.568.464)	(2.667.932.759)	(606.635.705)	22,738

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 Juni 2023 DAN 30 Juni 2022 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,153,039,155	23,860,648,925	7,292,390,230	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,274,568,464)	(2,667,932,759)	(606,635,705)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	
LAIN-LAIN	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,188,206,071	8.046.184.172	(5,857,978,101)	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,086,362,393)	5,378,251,413	(6,464,613,806)	
EKUITAS AKHIR	30,066,676,762	29,238,900,338	827,776,424	

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset Tetap SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumberpendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 2 (dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. Revisi I tanggal 10 Februari 2023 berupa Revisi POK dan Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan I (Januari-Maret).
2. Revisi II tanggal 14 April 2023 berupa Revisi POK dan Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni).

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.315.521.000	3.315.521.000
Belanja Barang	1.208.789.000	1.208.789.000
Belanja Modal	15.000.000	15.000.000
Jumlah Belanja	4.539.310.000	4.539.310.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp.
0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,-.

No.	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp2.170.837.321

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.170.837.321,- atau sebesar 47,82% dari anggaran senilai Rp. 4.539.310.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2023 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023

Uraian	2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.315.521.000	1.689.403.080	51
Belanja Barang	1.208.789.000	466.884.241	39
Belanja Modal	15.000.000	14.550.000	97
Total Belanja Bruto	4.539.310.000	2.170.837.321	47,82
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	4.539.310.000	2.170.837.321	47,82

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja per 30 Juni 2022, yakni sebesar Rp 8.046.184.172,- yang menyerap 63,97% anggaran dari total PAGU Rp 12.578.823.000,-, Realisasi Belanja per 30 Juni 2023 mengalami penurunan persentase penyerapan anggaran yang cukup signifikan sebesar 16,15%. Hal ini disebabkan perubahan PAGU yang juga sangat signifikan, yakni dari angka Rp 12.578.823.000 pada TA 2022 menjadi Rp 4.539.310.000,- di TA 2023. Perubahan PAGU anggaran ini disebabkan telah selesainya pembangunan gedung kantor PTUN Pangkalpinang di TA 2022. Pada Bulan Maret 2022, dilaksanakan pembayaran termin terakhir pembangunan gedung kantor PTUN Pangkalpinang yang mendongkrak realisasi anggaran Semester I TA 2022.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp1.689.403.080*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1.689.403.080,-. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp. 466.884.241*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 466.884.241,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 38.400.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 38.400.000,- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	17.665.776
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	20.734.224
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	38.400.000

Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp 0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan:
Rp
5.901.779

Persediaan per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 5.901.779,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni TA 2023

Uraian	TA 2023
Barang Konsumsi	5.355.519
Bahan Untuk Pemeliharaan	546.260
Total	5.901.779

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan berita acara stock opname fisik .

C.4. Tanah

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional kantor. Tanah memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya kegiatan kantor.

Aset tetap berupa tanah dalam akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan.

Tanah Per 30 Juni 2023 disajikan senilai Rp 25.308.000,-.

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2023 adalah Rp. 7.057.970.407,- dengan nilai buku sebesar Rp 4.555.356.576,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	7.023.570.407
Mutasi Tambah	34.400.000
Transfer Masuk	19.850.000
Pembelian	14.550.000
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2023	7.057.970.407
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(2.502.613.831)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	4.555.356.576

C.6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan sebesar Rp 26.464.419.989,- dengan akumulasi penyusutan senilai Rp 780.965.683,-, sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp 25.683.454.306,-. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2022. Nilai gedung dan bangunan berasal dari segala pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya administrasi lain-lain.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar Rp 190.000,- yang merupakan 2 buah monografi.

C.8. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp (3.303.869.514,-) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp 3.283.579.514,- dan akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya senilai Rp 20.290.000,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.9. Aset Lainnya

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Asset lain-lain Per 30 Juni 2023 disajikan sebesar Rp 20.290.000,- yang merupakan peralatan dan mesin berupa mesin absensi senilai Rp 6.100.000,-, kursi besi/metal senilai Rp 4.200.000,-, PC senilai Rp 9.990.000,- yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat. Aset ini bernilai buku Rp 0,- setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.290.000,-.

C.10. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 38.400.000,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.11. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 182.799.675, yang merupakan gaji pegawai Bulan Juli 2023 sebesar Rp 160.410.675 dan honor PPNPN Bulan Juni 2023 senilai Rp 22.389.000,- yang belum terbit SP2D. Sedangkan utang yang belum ditagihkan senilai Rp 20.734.224,- yang merupakan nilai kuitansi UP yang belum di SPM GUKan.

C.12. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 30.066.676.762,-*

Ekuitas per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 30.066.676.762,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp.0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah Rp. 0

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023

Uraian	TA 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	
Total Pendapatan	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 1.834.034.755,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.834.034.755,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Gaji Pokok PNS	613.017.240	664.304.700
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.212	8.615
Pengembalian B. Pembulatan	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.319.840	40.068.668
Beban Tunj. Anak PNS	13.947.586	13.725.620
Beban Tunj. Struktural PNS	17.820.000	25.920.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	872.715.000	859.990.000
Beban Tunj. PPh PNS	128.681.297	129.303.587
Beban Tunj. Beras PNS	32.516.580	36.282.420
Beban Uang Makan PNS	65.928.000	66.990.000
Pengembalian B. Uang Makan PNS	0	-351.500
Beban Tunjangan Umum PNS	6.430.000	7.355.000
Pengembalian B. Tunjangan Umum PNS	0	-365.044
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	52.650.000	54.000.000
Total Beban Pegawai	1.834.034.755	1.897.232.066

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp22.336.792

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp 22,336,792,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023
Beban Persediaan Konsumsi	22,336,792
Total Beban Persediaan	22,336,792

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.368.527.355,-*

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni TA 2023 sebesar Rp. 368.527.355,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Keperluan Perkantoran	259,978,398	255,759,850
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,775,500	2,163,200
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,765,000	21,300,000
Beban Barang Operasional Lainnya	0	24,516,500
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	21,630,000
Beban Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	0	6,166,500
Beban Peralatan dan Mesin - Esktrakomptabel	1,900,000	0
Beban Langganan Listrik	0	70,490,865
Beban Langganan Telepon	2,143,457	2,483,073
Beban Langganan Air	0	431,000
Beban Sewa	75,965,000	61,820,000
Total Beban Barang dan Jasa	368.527.355	466.760.988

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan: Rp
86.961.282,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 86.961.282,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,865,500	78,580,000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,708,109	52,524,528
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,387,673	4,976,500
Total Beban Pemeliharaan	86.961.282	136.081.028

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.27.547.820

Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I TA 2023 sebesar Rp. 27.547.820,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Perjalanan Biasa	27.547.820	9,914,472
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	27.547.820	9,914,472

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi :

Rp. 935.160.460,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2023 sebesar Rp.935.160.460,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	669,352,581	140,655,105
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	264,777,879	0
Beban Amortisasi Software	0	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	1,030,000	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	935.160.460	140,655,105

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan
Non Operasional
Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023

Uraian	TA 2023
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.31.153.039.155,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp. 31.153.039.155,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO
: (Rp 3.274.568.464,-)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp. 3.274.568.464,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi: Rp0

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar
Entitas :
Rp2.188.206.071,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.188.206.071,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.170.837.321
Diterima Dari Entitas Lain	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	17.368.750
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	2.188.206.071

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.2.170.837.321,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.30.066.676.762,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 30.066.676.762,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan atas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Tidak ada PAGU Belanja penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester I TA 2023.

F.2.2. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2023 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2023.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 2.178.420,-

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan SEMESTER I 2023 terdapat 2 (dua) Revisi DIPA yaitu:

1. Revisi I tanggal 10 Februari 2023 berupa Revisi POK dan Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan I (Januari-Maret).
2. Revisi II tanggal 14 April 2023 berupa Revisi POK dan Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni).

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan SEMESTER I 2023 tidak terdapat ralat SPM dan SSBP, dan SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Semester I Tahun 2023 ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38,400,000	0	38,400,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,248,750	(1,248,750)	(100.00)
Persediaan	5,901,779	444,500	5,457,279	1,227.73
JUMLAH ASET LANCAR	44,301,779	1,693,250	42,608,529	2,516.38
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,057,970,407	7,023,570,407	34,400,000	0.49
Gedung dan Bangunan	26,464,419,989	26,464,419,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,283,579,514)	(2,346,967,804)	(936,611,710)	39.91
JUMLAH ASET TETAP	30,264,308,882	31,166,520,592	(902,211,710)	(2.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(20,290,000)	(19,260,000)	(1,030,000)	5.35
JUMLAH ASET LAINNYA	0	1,030,000	(1,030,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	30,308,610,661	31,169,243,842	(860,633,181)	(2.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	182,799,675	16,204,687	166,594,988	1,028.07
Utang Yang Belum Ditagihkan	20,734,224	0	20,734,224	0.00
Uang Muka dari KPPN	38,400,000	0	38,400,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241,933,899	16,204,687	225,729,212	1,392.99
JUMLAH KEWAJIBAN	241,933,899	16,204,687	225,729,212	1,392.99
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH EKUITAS	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH EKUITAS	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,308,610,661	31,169,243,842	(860,633,181)	(2.76)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

**SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG**

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
197110121992032001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_salker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	3,315,521,000	1,689,403,080	1,626,117,920	51	3,525,673,000	1,527,506,478	1,998,166,522	43
	BELANJA BARANG	1,208,789,000	466,884,241	741,904,759	39	1,538,101,000	615,261,598	922,839,402	40
	BELANJA MODAL	15,000,000	14,550,000	450,000	97	7,515,049,000	5,903,416,096	1,611,632,904	79
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,539,310,000	2,170,837,321	2,368,472,679	48	12,578,823,000	8,046,184,172	4,532,638,828	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
197110121992032001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal	: 25/07/23 8:36 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 3000	BANGKA BELITUNG	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 25/7/23 6:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,118,578,000	1,118,578,000	551,122,440	0	551,122,440	49.27	567,455,560
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,000	14,000	8,407	0	8,407	60.05	5,593
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65,830,000	65,830,000	27,545,220	0	27,545,220	41.84	38,284,780
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,079,000	25,079,000	12,510,898	0	12,510,898	49.89	12,568,102
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,440,000	43,440,000	15,480,000	0	15,480,000	35.64	27,960,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,458,220,000	1,458,220,000	798,620,000	0	798,620,000	54.77	659,600,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	201,285,000	201,285,000	119,949,015	0	119,949,015	59.59	81,335,985
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	61,214,000	61,214,000	29,330,100	0	29,330,100	47.91	31,883,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	166,996,000	166,996,000	81,707,000	0	81,707,000	48.93	85,289,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12,865,000	12,865,000	5,880,000	0	5,880,000	45.71	6,985,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	162,000,000	162,000,000	47,250,000	0	47,250,000	29.17	114,750,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,315,521,000	3,315,521,000	1,689,403,080	0	1,689,403,080	50.95	1,626,117,920
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,315,521,000	3,315,521,000	1,689,403,080	0	1,689,403,080	50.95	1,626,117,920
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	513,650,000	513,650,000	234,766,500	0	234,766,500	45.71	278,883,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	1,524,500	0	1,524,500	25.41	4,475,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,796,000	74,796,000	21,412,000	0	21,412,000	28.63	53,384,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	594,446,000	594,446,000	257,703,000	0	257,703,000	43.35	336,743,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	2,181,000	2,181,000	1,900,000	0	1,900,000	87.12	281,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,181,000	2,181,000	1,900,000	0	1,900,000	87.12	281,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,600,000	54,600,000	28,797,245	0	28,797,245	52.74	25,802,755
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,600,000	54,600,000	28,797,245	0	28,797,245	52.74	25,802,755
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	2,144,567	0	2,144,567	35.74	3,855,433
522141	Belanja Sewa	95,720,000	95,720,000	75,965,000	0	75,965,000	79.36	19,755,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	101,720,000	101,720,000	78,109,567	0	78,109,567	76.79	23,610,433
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	238,327,000	228,223,000	19,871,500	0	19,871,500	8.71	208,351,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140,295,000	150,399,000	52,955,109	0	52,955,109	35.21	97,443,891

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/23 8:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/7/23 6:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	378,622,000	378,622,000	72,826,609	0	72,826,609	19.23	305,795,391
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	77,220,000	77,220,000	27,547,820	0	27,547,820	35.67	49,672,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,220,000	77,220,000	27,547,820	0	27,547,820	35.67	49,672,180
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,208,789,000	1,208,789,000	466,884,241	0	466,884,241	38.62	741,904,759
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000	15,000,000	14,550,000	0	14,550,000	97	450,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000	15,000,000	14,550,000	0	14,550,000	97	450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	15,000,000	15,000,000	14,550,000	0	14,550,000	97	450,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	15,000,000	15,000,000	14,550,000	0	14,550,000	97	450,000
	JUMLAH BELANJA	4,539,310,000	4,539,310,000	2,170,837,321	0	2,170,837,321	47.82	2,368,472,679

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,834,034,755	1,897,232,066	(63,197,311)	(3.331)
Beban Persediaan	22,336,792	17,289,100	5,047,692	29.196
Beban Barang dan Jasa	368,527,355	466,760,988	(98,233,633)	(21.046)
Beban Pemeliharaan	86,961,282	136,081,028	(49,119,746)	(36.096)
Beban Perjalanan Dinas	27,547,820	9,914,472	17,633,348	177.855
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
 PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	935,160,460	140,655,105	794,505,355	564.861
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,274,568,464	2,667,932,759	606,635,705	22.738
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,274,568,464)	(2,667,932,759)	(606,635,705)	22.738
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,274,568,464)	(2,667,932,759)	(606,635,705)	22.738
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,274,568,464)	(2,667,932,759)	(606,635,705)	22.738

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,153,039,155	23,860,648,925	7,292,390,230	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,274,568,464)	(2,667,932,759)	(606,635,705)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,188,206,071	8,046,184,172	(5,857,978,101)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,086,362,393)	5,378,251,413	(6,464,613,806)	-
EKUITAS AKHIR	30,066,676,762	29,238,900,338	827,776,424	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	38,400,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,355,519	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	546,260	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,057,970,407	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,464,419,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,502,613,831
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	780,965,683
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	20,290,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	20,290,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	160,410,675
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	22,389,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	20,734,224
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	38,400,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,170,837,321
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,368,750
0.0	391111	Ekuitas	0	31,153,039,155
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	613,017,240	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,212	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30,319,840	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,947,586	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,820,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	872,715,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	128,681,297	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,516,580	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	65,928,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,430,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	52,650,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	259,978,398	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,775,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,765,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,900,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,143,457	0
3.0	522141	Beban Sewa	75,965,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,865,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61,708,109	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	27,547,820	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 8:33 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	669,352,581	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	264,777,879	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,030,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,336,792	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,387,673	0
JUMLAH			36,887,048,639	36,887,048,639

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 10:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,170,837,321
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	551,122,440	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,407	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	27,545,220	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,510,898	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,480,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	798,620,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	119,949,015	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	29,330,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	81,707,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,880,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	47,250,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	234,766,500	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,524,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	21,412,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,900,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	28,797,245	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,144,567	0
3.0	522141	Belanja Sewa	75,965,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,871,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,955,109	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	27,547,820	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,550,000	0
JUMLAH			2,170,837,321	2,170,837,321

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 25 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401968
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,539,310,000	4,539,310,000	0
2	Belanja	2,170,837,321	2,170,837,321	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	38,400,000	38,400,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	38,400,000	38,400,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-JUL-23



KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT SATKER

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Kode UAPPA-W dan Nama UAPPA-W : (005.01.3000) Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Kode UAPPA dan Nama UAPPA : (401968) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) sesuai PMK 222/2016	Ada	Tidak
1, Pernyataan telah di-review oleh APIP	N/A	Ada
1, Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2, LRA, Neraca, LO, dan LPE face	✓	Ada
3, Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
4, Ikhtisar Laporan BLU (Jika Ada)	N/A	Ada
5, Ikhtisar Laporan Badan Lainnya	N/A	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1, Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
2, Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
3, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓	Ada
4, Lainnya ...	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1, Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE, dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1, Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2, Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LPE	✓	Sama
3, Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1, Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (cek di e-Rekon&LK, menu Daftar>>Akun Non Ref)		✓
2, Adakah "Saldo Tidak Normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang dan Aset yang Belum Diregister		✓
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1XXXXX)	Ada	Tidak
Adakah Akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di KL/L tersebut, misal		✓
1, Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau piutang BLU layanan kesehatan di Kementerian Dikti.		✓
2, Adakah Akun 1xxxxx hingga 115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya akun dari 116xx hingga 119xx, selain adanya akun BUN)		✓
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak
1, Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓

2, Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2XXXXX)	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Adakah saldo 218211-Hibah Langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (cek di neraca percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2, Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah nilainya sama dengan akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, cetak di Neraca Percobaan Tahun 2021)	N/A	N/A	Ya
3, Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 diakhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
Sehubungan dengan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang			
4, Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya <akun 218211?	N/A	N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3XXXXX)	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 391117-Penyediaan Nilai Persediaan		√	Tidak
2, Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. di RRI, TVRI, dan POLRI		√	Tidak
3, Adakah saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	N/A	N/A	Ya
4, Adakah saldo akun 391151-Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
Jika ada, Apakah saldo akun 391151-Koreksi Atas Reklasifikasi ersediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	N/A	N/A	Ya
6, Apakah saldo akun 391131-Pengesahan hibah langsung > akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	N/A	N/A	Ya
Saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan rekals masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-Rekon			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 312211-Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Nilai Absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	Rp0		
Selisih secara absolut diperoleh dari e-erekon & LK (menu monitoring>>Tranfer Masuk/Transfer Keluar), dengan menggunakan kolom TK dengan kolom TM, kemudia hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TK/TM secara absolut tersebut?			
2, Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	Rp0		
AKUN PENDAPATAN (4XXXXX)			
AKUN Pendapatan Perpajakan (41XXXX)	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 423xxx (Pendapatan Non Perpajakan)?		√	Tidak
2, Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3, Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4, Adakah akun 425xxx khusus Bun? Yaitu 425143,425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan Akun Yang Tidak Sesuai Karakteristik Tupoksi Entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun yang tidak normal keberadaanya? Misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2, Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya di KL? Seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
AKUN Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2, Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban bunga, Subsidi, Hibah dan lain-lain)?		√	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum disahkan"		√	Tidak
2, Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-Rekon? (cek pada aplikasi e-rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak

Jika TIDAK memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2, Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3, Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp		-
2, Isi kolom di sebelah kanan sald akun 593311	Rp		-
3, Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp		-
4, Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara : membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar),atau membuat benchmark per satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.			
5, Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk (M07)		√	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07			
6, Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19?	√		Ya/Tidak
7, 19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi COVID-19?	√		Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2, Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3, Adakah beban bunga		√	Tidak
4, Adakah beban subsidi		√	Tidak
5, Adakah beban hibah		√	Tidak
6, Adakah beban transfer		√	Tidak
7, Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ya	Tidak	Seharusnya
8, Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9, Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa),</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/PB/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10, Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	N/A	N/A	Ya
<i>Jia hasil di atas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih di atas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1, Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2, Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1, Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
Pengungkapan 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp.50.450.000 disebabkan oleh adanya transaksi normalisasi BMN diaplikasi SIMAK BMN terkait dengan nilai perolehan minus pada Rumah Negara pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan			
N E R A C A			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2, Apakah ada Penjumlahan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "Ali" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan akun beban (D/K)			
Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah 3, Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4, Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2020, Apakah demikian?	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1, Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyesuaian piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2, Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyesuaian Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A	N/A	Ada
- Beban Penyesuaian Piutang (di LO)	N/A	N/A	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
3, Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A	N/A	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4, Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5, Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi Penyusutan AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6, Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ada/Tidak
- Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7, Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
- Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8, Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9, Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10, Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)?	√		Ada/Tidak

- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada/Tidak
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK? maupun absolut		√	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal positif)			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ? maupun absolut	√		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon			
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , 1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	√		
MENU DAFTAR BMN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah nilai perolehan minus (intrakomptabel)		√	Tidak
2. Berapa NUP BMN dengan nilai perolehan minus ? (diisi jumlah NUP)			-
3. Berapa total nilai BMN dengan nilai perolehan minus ? (diisi nilai rupiahnya)			-
4. Adakah nilai buku minus (intrakomptabel) ?		√	Tidak
5. Berapa NUP BMN dengan nilai buku minus ? (diisi jumlah NUP)			-
6. Berapa total nilai BMN dengan nilai buku minus ? (diisi nilai rupiahnya)			-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")	√		Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak " bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			
SATKONS DAN PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (dinihilkan) ?	N/A	N/A	
2. Apakah sudah dilakukan jurnal Take-In Reval dengan benar?	N/A	N/A	
Cek kebenaran apabila ada jurnal baru di Tahun 2021			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen " pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A	N/A	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN				
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)		√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK		Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca?		√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?		√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?		√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?		√		Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif, pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.				
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?		N/A	N/A	Ada
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?		√		Ada
8. Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 telah dijelaskan dalam CaLK?		√		Ada
ANALISIS LAINNYA				
Analisis Laporan Keuangan Lainnya		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional		√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDPIPengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang		√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2019		√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan)		√		Ada
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA		Ya	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPATERkait penanganan Pandemi Covid-19		√		
Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan 2. Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L				
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN sebagai dampak Pandemi Covid-19			√	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			√	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			√	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA		Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak '		√		
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan			√	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan		√		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA		Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk -			√	
11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa			√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK-LRA		Ada	Tidak	
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :			√	
a. Kenaikan penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19			√	
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19			√	
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19			√	
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan			√	
11. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain:			√	
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19			√	
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19			√	
Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rambu Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&K.				
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon & LK"				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL, (Romatua Lasma Sembiring, S.H.) NIP : 19711012 199203 2 001		Pangkal Pinang, 30 Juni 2023 Penelaah, (Muhammad Agus, S.E., M.Si.) NIP : 19850207 200604 1 001		

DATA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIPA 01
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

[illegible]

Pangkalpinang, 30 Juni 2022

Sekretaris Pengadiln Tata Usaha Negara Pangkalpinang

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.

NIP. 19711012 199203 2 001

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 Juni 2023

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
----	--------------	-----	--------	-----------	----------------	---------------	------	----------------------	------------------

NIHIL									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2022				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	401968	PTUN Pangkalpinang	Rp 17.665.776	Rp	BRI Cab Pangkalpinang 653244019681000	Rp 17.665.776	Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 17.665.776,-,-
					Rp 20.734.224	Rp		Rp 20.734.224	Kuitansi UP
					Rp -	Rp		Rp -	Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
					Rp 38.400.000	Rp		Rp 38.400.000	Jumlah UP

Sekretaris

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2023					
					TUNAI	Saldo Bank			Total	
						Saldo	Bank dan No Rek			
1	3000	Bangka	401968	Pengadilan	0	0	-	0		
		Belitung		Tata Usaha Negara Pangkalpinang						
JUMLAH					Rp	-	Rp	-	Rp	-

Sekretaris

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET
NIHIL							

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Barang



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

DAFTAR HIBAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PER 30 Juni 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

INFORMASI UMUM				PEMERINTAH MASUK REKENING TAHUN INI					KORNIK PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG					PEMERINTAH HIBAH TAHUN INI (SPALUPHLEJ)					PEMERINTAH HIBAH TAHUN INI				
NO	KOMOR REGISTER	1	TGL. PEMESANAN HIBAH	MATA UANG	NILAI	KOMOR REKENING	TGL. PENGESAHAN		UANG		BARANG/JASA			TOL. PEMERINTAH HIBAH	UANG		BARANG/JASA		NOMOR BAST				
							IDR	VALAS	MATA UANG	IDR	UANG	MATA UANG	VALAS		NILAI	MATA UANG	VALAS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					

NIHIL

NIHIL

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris

ROMATUA LASMA SEMBRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

SATKER : Pengadilaa Tata Usaha Negara Pangkalpinang (401968)
WILAYAH BANGKA BELITUNG

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2023

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
													Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1	401968	PTUN Pangkalpinang											NIHIL		

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Barang



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

KORWIL	KODE	SATKER	AKUN	URAIAN	AKRUAL PER TGL 30 JUNI 2023	JURNAL BALIK PER JANUARI 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	TGL SP2D	NO SP2D	SELISIH	KETERANGAN	DOKUMEN SUMBER
TIDAK ADA KOREKSI BEBAN 2022												

TIDAK ADA KOREKSI BEBAN 2022

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris



ROMATUA L. SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

REKAPITULASI DAFTAR REALISASI BELANJA EKSTRAKOMPTABEL (521252)

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA EKSTRAKOMPTABEL (521252)	Keterangan
1	3000	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	Rp 1.900.000,00	Pembelian 1 unit kursi CPNS dan 1 unit meja CPNS

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		
NIHIL						



Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2022

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TAHUN ANGGARAN	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	3000	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	2022	.	.	.	.	.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Sekretaris



ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

FORMULIR JURNAL BALIK

Kementerian Negara/Lembaga	: 005	MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon	: 01	UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Wilayah	: 3000	BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja	: 401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
No. Dokumen	:	Jurnal Balik Atas Belanja yang Dibayar di Muka (Prepaid)
Tanggal	: 2 Januari 2023	
Tahun Anggaran	: 2023	
Keterangan	:	Jurnal Balik Atas Beban Dibayar di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima ☒ Belanja Dibayar Di Muka ☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar ☐ Penyisihan Piutang ☐ Penghapusan Piutang ☐ Penyusutan Aset ☐ Kas Di Bendaharan Penerimaan ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran ☐ Persediaan	Koreksi Antar Beban Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan Piutang Jangka Pendek Transfer Masuk Transfer Keluar Reklasifikasi Neraca Koreksi Hibah Langsung
--	---

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521111	Belanja keperluan perkantoran	1.248.750	
	K	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)		1.248.750
Total				1.248.750	1.248.750

Dibuat oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan
 Tanggal : 2 Januari 2023

Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 2 Januari 2023

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 2 Januari 2023

Muhammad Agus, S.E., M.Si.
 NIP.198502072006041001

(Romatua Lasma Sembiring, S.H.)
 NIP : 197110121992032001

Rosalina, S.E.
 NIP.199208082019032017

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.

FORMULIR JURNAL BALIK

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 3000 BANGKA BELITUNG
 Satuan Kerja : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 No. Dokumen : Jurnal Balik Atas Belanja yang Masih Harus Dibayar
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Uang Makan PNS Bulan Desember 2022

Kategori Jurnal Balik

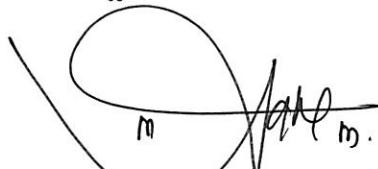
☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas Di Bendaharan Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	☐ Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	15.779.000	
	K	511129	Belanja uang makan PNS		15.779.000
Total				15.779.000	15.779.000

Dibuat oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan
 Tanggal : 2 Januari 2023

Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 2 Januari 2023

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 2 Januari 2023


 Muhammad Agus, S.E., M.Si.
 NIP.198502072006041001


 (Romatua Lasma Sembiring, S.H.)
 NIP : 197110121992032001


 Rosalina, S.E.
 NIP.199208082019032017

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.

FORMULIR JURNAL BALIK

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 3000 BANGKA BELITUNG
 Satuan Kerja : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 No. Dokumen : Jurnal Balik Atas Belanja yang Masih Harus Dibayar
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Tagihan Telepon Bulan Desember 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas Di Bendaharan Penerimaan	☐ Reklasifikasi Neraca
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	☐ Koreksi
☐ Persediaan	☐ Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	425.687	
	K	522112	Belanja langganan telepon		425.687
Total				425.687	425.687

Dibuat oleh : Kasubbag Umum dan Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 2 Januari 2023 Tanggal : 2 Januari 2023

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 2 Januari 2023

Muhammad Agus, S.E., M.Si.
 NIP.198502072006041001

(Romatua Lasma Sembiring, S.H.)
 NIP : 197110121992032001

Rosalina, S.E.
 NIP.199208082019032017

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PER 30 JUNI 2023**

NO	Kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Tahun Anggaran	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1	3000	Bangka Belitung	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	2023	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	160.410.675		Gaji induk PNS Bulan Juli 2023
2	3000	Bangka Belitung	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	2023	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	22.389.000		Penghasilan PPNPB Bulan Juni 2023 yang SP2D di 1 Juli 2023
3	3000	Bangka Belitung	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	2023	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	20.734.224		Kuitansi UP yang belum di SPM-kan
								203.533.899		


 Pangkalpinang, 30 Juni 2023
 Sekretaris

 Romatua Lasma Sembiring, S.H.
 NIP. 19711012 199203 2 001



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG (401968)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901004372304)
Virtual Account : 653244019681000 | BPG 015 PTUN PKP
Periode : 01-06-2023 s/d 30-06-2023

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-06-20	11:02:52	14511222	653244019681000	0,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	BRIVA	
2023-06-20	14:15:30	14521269	rosalina	3.645.000,00	3.645.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi				3.645.000,00	3.645.000,00				
Saldo Akhir							0,00		

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov Terpadu
Telp. 0717-9111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



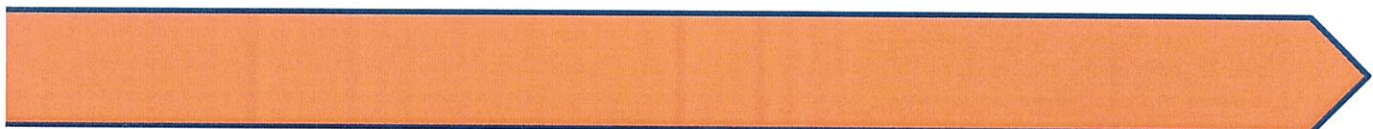
**BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	17
4.4. Lain-lain	18
V. Kendala dan Saran	18
5.1. Kendala	19
5.2. Saran	19
VI. Penutup	20
Lampiran	
A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
B. Laporan Barang Intrakomptabel	
C. Laporan Barang Ekstrakomptabel	
D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	
E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan	
F. Laporan Aset Tak Berwujud	
G. Laporan Barang Bersejarah	
H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan	
I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik	
J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca	
K. Laporan Hibah	
L. Laporan Penyusutan BMN	

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat

menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Barang



Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI ASET TETAP selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI ASET TETAP juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

Modul ASET TETAP diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI ASET TETAP diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SAKTI ASET TETAP dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI ASET TETAP menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI ASET TETAP dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI ASET TETAP dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI ASET TETAP mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI ASET TETAP merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI ASET TETAP.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Sakti Modul Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data pendukung SAKTI ASET TETAP dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi intenal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI

ASET TETAP , sehingga proses penyamaan data dilakukan secara otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ke tingkat Pengguna Barang, yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp 31.189.196.622 (*Tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	5.901.779
Tanah	25.308.000
Peralatan dan Mesin	7.043.420.407
Gedung dan Bangunan	26.464.419.989
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.833.261.250)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(516.187.804)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(19.260.000)
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	31.189.196.622

Berikut tabel dan grafik kenaikan/penurunan nilai BMN Semester II 2022 dengan Semester I 2023.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023
(NILAI INTRAKOMPTABEL)*

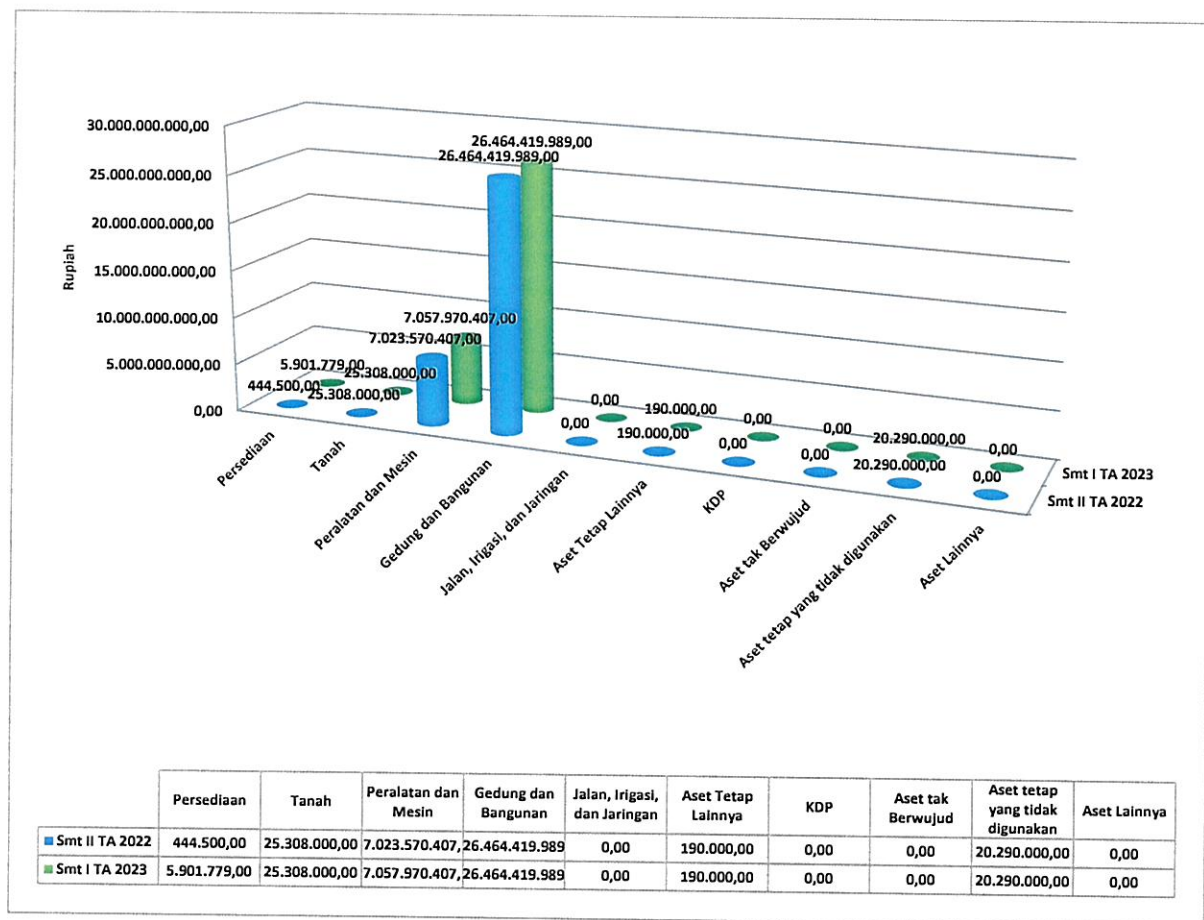
<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2022</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>
Persediaan	444.500	5.901.779
Tanah	25.308.000	25.308.000
Peralatan dan Mesin	7.023.570.407	7.057.970.407
Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	26.464.419.989
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.830.780.000)	(2.502.613.831)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(516.187.804)	(780.965.683)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	20.290.000
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(19.260.000)	(20.290.000)
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	31.169.243.842	30.308.610.661

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

(NILAI INTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan;

- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp 34.400.000,- yang berasal dari belanja modal 3 unit printer dan transfer masuk scanner.
- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang semester I tahun 2023 tidak mengalami yakni tetap senilai 26.464.419.989.
- d. Asset tetap lainnya berupa monografi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
- e. Aset tetap yang tidak digunakan oleh operasi pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak bertambah dari sebelumnya.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 mengalami perubahan nilai sebesar Rp 5.457.279,- yang berasal dari pembelian dan pemakaian barang persediaan.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

SEMESTER II TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER II TA 2022</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>
Barang Konsumsi	444.500	5.355.519
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	546.260

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 tidak ada pengerjaan konstruksi sehingga nilai dari konstruksi dalam pengerjaan Rp. 0

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Pada Neraca UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023, tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG*

SEMESTER I TAHUN 2023

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	5.901.779	5.901.779
Tanah	25.308.000	25.308.000
Peralatan dan Mesin	7.057.970.407	7.057.970.407
Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	26.464.419.989
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.502.613.831)	(2.502.613.831)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(780.965.683)	(780.965.683)
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	20.290.000
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(20.290.000)	(20.290.000)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0

Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	30.270.210.661	30.270.210.661

4.4 LAIN-LAIN

Pada Semester I TA 2023, terdapat pembelian aset ekstrakomptabel berupa :

<i>NAMA ASET</i>	<i>JUMLAH ASET</i>	<i>NILAI</i>
Meja Kerja Kayu	1	950.000
Kursi besi Metal	1	950.000

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya di bidang anggaran, manajemen aset (BMN) dan pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya.

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa asset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester 1 Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakandan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang .

Nilai BMN (intrakomptabel) yang disajikan pada Semester 1 Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. 30.264.308.882,- (Tiga puluh milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 31.165.520.592,- (Tiga puluh satu milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester 1 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 902.211.710,- (Sembilan ratus dua juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembelian dan transfer masuk selama tahun berjalan serta nilai akumulasi penyusutan semester I tahun 2023.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal GLP – Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2023

a. Saldo Awal Semester 1 TA 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2023 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp. 31.167.995.092,- (Tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. Rp. 31.167.550.592,- (Tiga puluh satu milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan nilai persediaan sebesar Rp. 444.500,- (*Empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 sebesar Rp. 5.901.779,- (*Lima juta Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 445.000,- (*Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 5.457.279,- (*Lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	445.000	4.910.519	5.355.519
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	546.260	546.260
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	445.000	5.457.279	5.901.779

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp 25.308.000,- (*Dua Puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah*). Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dari Semester 1 Tahun 2023

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 7.057.970.407,- (*Tujuh milyar lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 7.023.570.407,- (*Tujuh milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*), dan mutasi tambah sebesar Rp. 34.400.000- (*Tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*)

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)
101	Pembelian	14.550.000
102	Transfer Masuk	19.850.000

1) Alat Angkut Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Bantu Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 383.985.363,- (*Tiga ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*), tidak ada mutasi bertambah ataupun mutasi berkurang.

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian kondisi	kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	4	383.985.363
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Alat Angkut Darat Tak Bermotor(3.02.02)

Saldo Alat Angkut Darat Tak Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.787.980,- (*Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah*), saldo awal Rp. 0 (*nol rupiah*) dan mutasi tambah sebesar Rp. 9.787.980,- (*Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah*) mutasi berkurang Rp. 0 (*Nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

:

Uraian kondisi	kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	9.787.980
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

3) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 996.075.801,- (*Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah*) dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikarenakan rusak berat senilai Rp. 6.100.000 (*Enam juta seratus ribu rupiah*).

4) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Sado alat rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 Rp. 3.918.830.320 (*Tiga milyar Sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp. 4.200.000 (*Empat juta dua ratus ribu rupiah*).

5) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 83.004.000,- (*Delapan puluh tiga juta empat ribu rupiah*).

6) Alat komunikasi (3.06.02)

Saldo alat komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 sebesar Rp. 84.662.544 (*Delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

7) Peralatan Pemancar (3.06.3)

Saldo peralatan pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 sebesar Rp. 507.989.460 (*Lima ratus tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

8) Alat Kedokteran (3.07.01)

Saldo alat kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 sebesar Rp. 2.610.720 (*Dua juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).

9) Alat Kesehatan Umum (3.07.02)

Saldo alat kesehatan umum pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 sebesar Rp. 6.422.940 (*enam juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh*).

10) Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 611.275.933,- (*Enam ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*). Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian kondisi	kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	40	611.275.933
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	9.990.000

11) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang aset intrakomptabel per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 336.750.041,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 302.350.041,- (*Tiga ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu empat puluh satu rupiah*), mutasi bertambah sebesar Rp.34.400.000 (*Tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*) dan mutasi berkurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

12) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak ada jenis barang Alat Eksplorasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

13) Alat Pengeboran (3.12)

Tidak ada jenis barang Alat Pengeboran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

14) Alat Produksi (3.13)

Tidak ada jenis barang Alat Produksi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

15) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak ada jenis barang Alat Bantu Eksplorasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

16) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak ada jenis barang Alat Keselamatan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

17) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis barang Alat Peraga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

18) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Saldo peralatan proses produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 116.575.305,- (*seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah*).

19) Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada jenis barang Rambu-rambu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

20) Alat Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis barang alat olahraga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.464.419.989,- (*dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) tidak ada mutasi bertambah ataupun berkurang.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.464.419.989,- (*dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dan tidak ada mutasi bertambah ataupun berkurang.

b. Monumen (4.02)

Tidak ada jenis barang Monumen pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

c. Menara (4.03)

Tidak ada jenis barang Menara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Tidak ada jenis barang Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	26.464.419.989	(780.965.683)	25.683.454.306
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Menara	0	0	0

Total	26.464.419.989	(780.965.683)	25.683.454.306
-------	----------------	---------------	----------------

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada jenis barang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
24.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
25.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
26.	5.03 Instalasi	0	0	0
27.	5.04 Jaringan	0	0	0
Total		0	0	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 190.000 (*seratus Sembilan puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 190.000 (*seratus Sembilan puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester 1 Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp. 190.000 (*seratus Sembilan puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 190.000 (*seratus Sembilan puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*). Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian kondisi	kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	190.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

b. Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Tidak ada jenis barang Bercorak Kesenian pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

c. Hewan (6.03)

Tidak ada jenis Hewan pada Pengadilatan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

d. Ikan (6.04)

Tidak ada jenis Ikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

e. Tanaman (6.05)

Tidak ada jenis Tanaman pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

f. Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)

Tidak ada jenis Aset Tetap dalam Renovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	190.000	0	190.000
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	0	0	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		190.000	0	190.000

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 dikarenakan pembangunan gedung kantor dan sarana lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah selesai pengerjaannya.

h. Aset Lainnya

1) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tidak ada Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2) Aset Tak Berwujud

Tidak ada Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

3) BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah

Saldo Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp 20.290.000,- (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 20.290.000,- (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Uraian	Kondisi	kuantitas	Nilai (Rp)
Alat kantor	Rusak Berat	1	6.100.000
Alat Rumah Tangga	Rusak Berat	1	4.200.000
Komputer unit	Rusak Berat	1	9.900.000

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	8.01 Aset tak berwujud	0	0	0
2.	Aset yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah	20.290.000	(20.290.000)	20.290.000
Total		20.290.000	(20.290.000)	20.290.000

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

1. Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 31.183.929.342,- (*tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Persediaan	5971.009
131111	Tanah	25.308.000
132111	Peralatan dan Mesin	7.057.970.407
133111	Gedung dan Bangunan	26.464.419.989
135121	Aset Tetap Lainnya	190.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.502.613.831)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(780.965.683)
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	20.290.000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	(20.290.000)
JUMLAH		30.270.210.661

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	5.901.779	5.901.779
Tanah	25.308.000	25.308.000
Peralatan dan Mesin	7.057.970.407	7.057.970.407
Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	26.464.419.989
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.502.613.831)	(2.502.613.831)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(780.965.683)	(780.965.683)
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	20.290.000
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(20.290.000)	(20.290.000)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	30.308.610.661	30.308.610.661

2. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkahstrategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan laporan keuangan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Semester 1 Tahun 2023
Kuasa Pengguna Barang


Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

LAMPIRAN I

*CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA*

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK
POSISI SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal : 30/07/2023 20.17.36
Halaman : 1 dari 5
Kode Lap : LBCSGBT

NAMA UAKPB : 005.01.3000 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
131111 Tanah

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA		4,000	25,308,000	4,000	25,308,000	0	0
	SALDO AWAL		4,000	25,308,000	4,000	25,308,000	0	0
TOTAL				25,308,000		25,308,000		0

Pangkalpinang, 29 June 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris


Romatua Lasha Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK
POSISI SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal : 30/07/2023 20.17.36
Halaman : 2 dari 5
Kode Lap : LBCSGBT

NAMA UAKPB : 005.01.3000 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL			INTRAKOMPTABEL			EKSTRAKOMPTABEL		
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	NILAI	KUANTITAS	NILAI	NILAI	KUANTITAS	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5		6	7		8	9	
3.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		1	110,355,000		1	110,355,000		0	0	0
	SALDO AWAL		1	110,355,000			110,355,000		0	0	0
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		1	223,880,363		1	223,880,363		0	0	0
	SALDO AWAL		1	223,880,363		1	223,880,363		0	0	0
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		2	49,750,000		2	49,750,000		0	0	0
	SALDO AWAL		2	49,750,000		2	49,750,000		0	0	0
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		25	96,564,000		24	95,664,000		1	900,000	
	SALDO AWAL		25	96,564,000		24	95,664,000		1	900,000	
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		2	33,600,000		2	33,600,000		0	0	0
	SALDO AWAL		2	33,600,000		2	33,600,000		0	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		60	203,462,300		38	193,072,300		22	10,390,000	
	SALDO AWAL		58	201,562,300		38	193,072,300		20	8,490,000	
101	Pembelian		2	1,900,000		0	0		2	1,900,000	
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN		9	31,005,000		6	30,000,000		3	1,005,000	
	SALDO AWAL		9	31,005,000		6	30,000,000		3	1,005,000	
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		7	68,287,000		7	68,287,000		0	0	0
	SALDO AWAL		7	68,287,000		7	68,287,000		0	0	0
3.05.02.99	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA		2	630,000		0	0		2	630,000	
	SALDO AWAL		2	630,000		0	0		2	630,000	
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO		5	26,372,000		5	26,372,000		0	0	0
	SALDO AWAL		5	26,372,000		5	26,372,000		0	0	0
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		2	57,157,000		1	56,632,000		1	525,000	

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK
POSISI SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal : 30/07/2023 20.17.36
Halaman : 3 dari 5
Kode Lap : LBCSGBT

NAMA UAKPB : 005.01.3000 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SALDO AWAL		2	57,157,000	1	56,632,000	1	525,000
3.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM		1	950,000	0	0	1	950,000
	SALDO AWAL		1	950,000	0	0	1	950,000
3.08.03.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC		1	800,000	0	0	1	800,000
	SALDO AWAL		1	800,000	0	0	1	800,000
3.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN		1	905,700	0	0	1	905,700
	SALDO AWAL		1	905,700	0	0	1	905,700
3.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN		9	123,840,000	9	123,840,000	0	0
	SALDO AWAL		9	123,840,000	9	123,840,000	0	0
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER		17	203,022,200	17	203,022,200	0	0
	SALDO AWAL		17	203,022,200	17	203,022,200	0	0
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		14	47,350,000	8	42,600,000	6	4,750,000
	SALDO AWAL		10	12,950,000	4	8,200,000	6	4,750,000
101	Pembelian		3	14,550,000	3	14,550,000	0	0
102	Transfer Masuk		1	19,850,000	1	19,850,000	0	0
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN		4	220,916,590	4	220,916,590	0	0
	SALDO AWAL		4	220,916,590	4	220,916,590	0	0

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK
POSISI SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal : 30/07/2023 20.17.36
Halaman : 4 dari 5
Kode Lap : LBCSGBT

NAMA UAKPB : 005.01.3000 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				1,498,847,153		1,477,991,453		20,855,700

Pangkalpinang, 29 June 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris



Romatua Larma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK
POSISI SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA UAKPB : 005.01.3000 PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
135121 Aset Tetap Lainnya
Tanggal : 30/07/2023 20.17.36
Halaman : 5 dari 5
Kode Lap : LBCSGBT

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.01.01.01	BUKU		2	190,000	2	190,000	0	0
	SALDO AWAL		2	190,000	2	190,000	0	0
TOTAL				190,000		190,000		0

Pangkalpinang, 29 June 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris


Romalua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tanggal : 30/07/23 8:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI						SALDO PER 30 JUNI 2023	
			BERTAMBAH			BERKURANG							
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
131111	Tanah		4,000	25,308,000			0	0	0	4,000	25,308,000		
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	4,000	25,308,000			0	0	0	4,000	25,308,000		
132111	Peralatan dan Mesin		439	7,023,570,407			4	34,400,000	0	443	7,057,970,407		
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	1	110,355,000			0	0	0	1	110,355,000		
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	1	223,880,363			0	0	0	1	223,880,363		
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	2	49,750,000			0	0	0	2	49,750,000		
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	2	9,787,980			0	0	0	2	9,787,980		
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	54	521,365,810			0	0	0	54	521,365,810		
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	34	474,709,991			0	0	0	34	474,709,991		
3050201	MEUBELAIR	-	233	1,335,225,910			0	0	0	233	1,335,225,910		
3050206	ALAT PENDINGIN	-	7	2,049,589,144			0	0	0	7	2,049,589,144		
3060101	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	34	534,015,266			0	0	0	34	534,015,266		
3060102	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	5	26,372,000			0	0	0	5	26,372,000		
3060201	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	1	56,632,000			0	0	0	1	56,632,000		
3060309	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	1	84,662,544			0	0	0	1	84,662,544		
3060310	PERALATAN ANTENA UHF	-	1	1,100,000			0	0	0	1	1,100,000		
3060347	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	1	8,690,000			0	0	0	1	8,690,000		
3070112	SUMBER TENAGA	-	1	498,199,460			0	0	0	1	498,199,460		
3070299	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	-	2	2,610,720			0	0	0	2	2,610,720		
3100101	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	-	4	6,422,940			0	0	0	4	6,422,940		
3100102	KOMPUTER JARINGAN	-	10	222,633,733			0	0	0	10	222,633,733		
3100203	PERSONAL KOMPUTER	-	30	388,642,200			0	0	0	30	388,642,200		
3100204	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	7	19,920,211			4	34,400,000	0	11	54,320,211		
3170119	PERALATAN JARINGAN	-	5	282,429,830			0	0	0	5	282,429,830		
133111	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	3	116,575,305			0	0	0	3	116,575,305		
4010101	Gedung dan Bangunan	-	2	26,464,419,989			0	0	0	2	26,464,419,989		
4010130	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1	26,095,955,463			0	0	0	1	26,095,955,463		
135121	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	1	368,464,526			0	0	0	1	368,464,526		
6010101	Aset Tetap Lainnya		2	190,000			0	0	0	2	190,000		
165112	BUKU	-	2	190,000			0	0	0	2	190,000		
3050105	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	3	20,290,000			0	0	0	3	20,290,000		
3050201	ALAT KANTOR LAINNYA	-	1	6,100,000			0	0	0	1	6,100,000		
3100102	MEUBELAIR	-	1	4,200,000			0	0	0	1	4,200,000		
	PERSONAL KOMPUTER	-	1	9,990,000			0	0	0	1	9,990,000		
TOTAL				33,533,778,396			34,400,000		0		33,568,178,396		

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris



Romatua Lajma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001



LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005

UAPPB-E1 : 401968

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 30/07/23 8:13 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_satker

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI						SALDO PER 30 JUNI 2023	
			SALDO PER 1 JANUARI 2023			BERTAMBAH			BERKURANG			SALDO PER 30 JUNI 2023	
						KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
KODE	URAIAN		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
132111	Peralatan dan Mesin		41	21,863,250	2	1,900,000	0	0	43	23,763,250			
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000			
3050201	MEUBELAIR	-	20	8,490,000	2	1,900,000	0	0	22	10,390,000			
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000			
3050204	ALAT PENDINGIN	-	3	1,005,000	0	0	0	0	3	1,005,000			
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	-	2	630,000	0	0	0	0	2	630,000			
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000			
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	2	782,550	0	0	0	0	2	782,550			
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000			
3090407	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	-	1	905,700	0	0	0	0	1	905,700			
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000			
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	8	6,500,000	0	0	0	0	8	6,500,000			
TOTAL				21,863,250		1,900,000			0		23,763,250		

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris
Romatua Larma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230151301008273

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230151301008273	30-05-2023	31-05-2023	25,190,922	000387/401968/2023	30-05-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00038A

Tanggal 30-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pangkal Pinang (015)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 25.190.922,00

**** DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.401968/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN 2023

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401968.015.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	1.410.000,00
401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	1.900.000,00
401968.015.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	9.918.567,00
401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	3.381.500,00
401968.015.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	8.580.855,00

Jumlah Pengeluaran

25.190.922,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

25.190.922,00

Kepada:

Nomor : 838276

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Nama Supplier : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Rekening : 653244019681000

NPWP1 : 001088921304000

Nama Pemilik : BPG 015 PTUN PKP

NPWP2 : 001088921304000

Alamat : Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu

NOP :

Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

KOTA PANGKALPINANG, 30 Mei 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM

ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00038A

Tanggal : 30-Mei-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
401968.015.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000034-Keperluan Rumah Tangga Kantor	1.410.000,00
	Jumlah	1.410.000,00
401968.015.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000035-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai 40 org)	9.918.567,00
	Jumlah	9.918.567,00
401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000042-Pemeliharaan Gedung Kantor	3.164.500,00
	Jumlah	3.164.500,00
401968.015.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000043-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8.023.380,00
2	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	557.475,00
	Jumlah	8.580.855,00
401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000068-Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor	217.000,00
	Jumlah	217.000,00
Jumlah		25.190.922,00

KOTA PANGKALPINANG, 30 Mei 2023

a.n: Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatanganan SPM



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
 197110121992032001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00038T

Tanggal 30-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pangkal Pinang (015)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 25.190.922,00

**** DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.401968/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN 2023

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

401968.015.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	1.410.000,00
401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	1.900.000,00
401968.015.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	9.918.567,00
401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	3.381.500,00
401968.015.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	8.580.855,00

Jumlah Pengeluaran

25.190.922,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	25.190.922,00

Kepada:

Nomor : 838276

Nama Supplier : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG

NPWP1 : 001088921304000

NPWP2 : 001088921304000

NOP :

Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653244019681000

Nama Pemilik

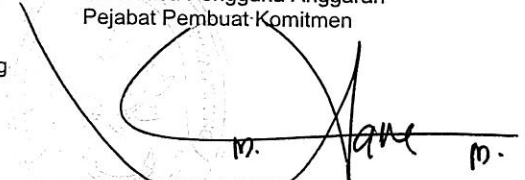
: BPG 015 PTUN PKP

Alamat

: Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Pangkalpinang, 30 Mei 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.
III/c 198502072006041001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

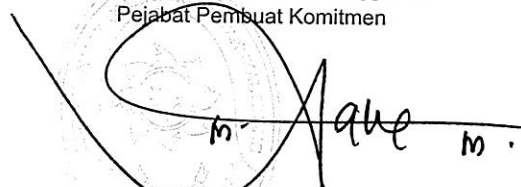
Nomor SPP : 00038T

Tanggal : 30-Mei-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
	401968.015.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000034-Keperluan Rumah Tangga Kantor	1.410.000,00
	Jumlah	1.410.000,00
	401968.015.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000035-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai 40 org)	9.918.567,00
	Jumlah	9.918.567,00
	401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000042-Pemeliharaan Gedung Kantor	3.164.500,00
	Jumlah	3.164.500,00
	401968.015.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000043-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8.023.380,00
2	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	557.475,00
	Jumlah	8.580.855,00
	401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000068-Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor	217.000,00
	Jumlah	217.000,00
	Jumlah	25.190.922,00

Pangkalpinang, 30 Mei 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.
III/c 198502072006041001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00008/DRPP/401968/2023

KEMENTERIAN : 005	MAHKAMAH AGUNG	DIPA : DIPA-005.01.2.401968/2023
UNIT ORGANISASI : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Kode Kegiatan : 1066
LOKASI : 51	KOTA PANGKALPINANG	Kode Output : EBA
SATUAN KERJA : 401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Tahun Anggaran : 2023
ALAMAT : -		Jenis SPP : 1 - UP
		Bulan : 05
		Pagu Output : 4,524,310,000
		No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00208/KW/401968/2023	Fajar Hidayat	013089883007000	523121	1,285,380
	16-05-2023	Servis mobil dinas Wakil Ketua (XPander Silver)			
2	00209/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521111	92,000
	16-05-2023	Pembelian air minum ruangan Ketua dan Wakil Ketua			
3	00210/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	902,575
	19-05-2023	Pembelian barang konsumsi keperluan kantor non ATK			
4	00211/KW/401968/2023	FANNY RUSPANJI	000000000304000	521252	950,000
	19-05-2023	Pembelian 1 unit kursi kerja CPNS			
5	00212/KW/401968/2023	FANNY RUSPANJI	000000000304000	521252	950,000
	19-05-2023	Pembelian 1 unit meja kerja CPNS			
6	00213/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	523111	180,000
	19-05-2023	Pembelian lakban AC			
7	00214/KW/401968/2023	FANNY RUSPANJI	000000000304000	523111	675,000
	19-05-2023	Pembelian 9 pipa talang air untuk dak void rooftop untuk mengatasi rembesan air dan bocor			
8	00215/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	549,000
	19-05-2023	Pembelian barang konsumsi keperluan kantor non ATK berupa tissue dan plastik sampah			
9	00216/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	111,000
	19-05-2023	Pembelian barang konsumsi keperluan kantor berupa kertas kambing dan tali			
10	00217/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	1,613,992
	19-05-2023	Pembelian ATK Kantor			
11	00218/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	1,821,500
	19-05-2023	Pembelian ATK Kantor			
12	00219/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	1,950,000
	19-05-2023	Pembelian ATK Kantor berupa catridge printer Canon 811			
13	00220/KW/401968/2023	ROLI	000000000304000	521811	1,075,000
	19-05-2023	Pembelian ATK kantor berupa catridge printer Canon 810 dan 811			

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00221/KW/401968/2023 19-05-2023	ROLI Pembelian ATK kantor	000000000304000	521811	10,000
15	00222/KW/401968/2023 22-05-2023	FANNY RUSPANJI Pembelian material/bahan pemasangan fiber void dan perbaikan pipa refrigerant (perbaikan bocor dan rembes dari atap)	000000000304000	523111	1,130,000
16	00223/KW/401968/2023 22-05-2023	ROLI Pembelian 1 gunting rumput dan tanaman	000000000304000	523111	130,000
17	00224/KW/401968/2023 22-05-2023	ROLI Pembelian ATK kantor	000000000304000	521811	100,000
18	00225/KW/401968/2023 22-05-2023	ROLI Pembelian ATK Kantor	000000000304000	521811	117,500
19	00226/KW/401968/2023 22-05-2023	ROLI Pembelian ATK Kantor	000000000304000	521811	1,650,000
20	00227/KW/401968/2023 22-05-2023	FAISAL Upah perbaikan pipa refrigerant dan pemasangan fiber void selama 2 hari	000000000304000	523111	800,000
21	00228/KW/401968/2023 23-05-2023	ROLI Pembelian air minum galon dan cup kebutuhan kantor	000000000304000	521111	299,000
22	00229/KW/401968/2023 24-05-2023	ROLI Pembelian bendera kantor (3 lembar ukuran 135 cm x 90 cm)	000000000304000	521111	300,000
23	00230/KW/401968/2023 24-05-2023	ROLI Pembelian air minum pimpinan dll	000000000304000	521111	164,000
24	00231/KW/401968/2023 24-05-2023	ROLI Pembelian ATK Kantor	000000000304000	521811	18,000
25	00232/KW/401968/2023 24-05-2023	ROLI Pembelian bola lampu LED untuk penggantian bola lampu yang rusak	000000000304000	523111	120,000
26	00233/KW/401968/2023 24-05-2023	ROLI Pembelian pengendali hama dan pembasmi serangga	000000000304000	523111	87,000
27	00234/KW/401968/2023 25-05-2023	ASIH AGENCY Tagihan koran Bangka Pos selama 4 bulan dari Bulan Januari 2023 s.d April 2023	000000000304000	521111	400,000
28	00235/KW/401968/2023 25-05-2023	ROLI Pembelian glue gun, lem lilin, tembakan sealant dll untuk perbaikan void atap dan fiber yang bocor	000000000304000	523111	109,500
29	00236/KW/401968/2023 25-05-2023	ROLI Pembelian bola lampu LED untuk penggantian lampu LED yang rusak	000000000304000	523111	150,000
30	00237/KW/401968/2023 26-05-2023	ASMANIDAR, S.H. Bensin mobil dinas Panitera Bulan Mei 2023	059421594201000	523121	1,500,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
31	00238/KW/401968/2023 26-05-2023	Lezi Fitri, S.H. Bensin motor dinas Panmud Perkara Bulan Mei 2023	096929179722000	523121	196,889
32	00239/KW/401968/2023 29-05-2023	Andri Swasono, S.H., M.Kn Bensin mobil dinas Wakil Ketua Bulan Mei 2023	083184697701000	523121	1,500,000
33	00240/KW/401968/2023 30-05-2023	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si. Bensin motor dinas Kasub Umum dan Keuangan Bulan Mei 2023	671964583309000	523121	360,586
34	00241/KW/401968/2023 30-05-2023	Romatua Lasma Sembiring Bensin mobil dinas Sekretaris Bulan Mei 2023	683900211113000	523121	1,523,000
35	00242/KW/401968/2023 30-05-2023	Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. BBM mobil dinas Ketua Bulan Mei 2023	000000000304000	523121	2,215,000
36	00243/KW/401968/2023 30-05-2023	Roli Pembelian air minum galon isi ulang dan air minum cup untuk pengujung sidang/PTSP	000000000304000	521111	155,000
Jumlah Lampiran 36 Lembar				Jumlah SPP ini :	25,190,922
				Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	227,359,319
				Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	252,550,241

KOTA PANGKALPINANG, 30-05-2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
III/c-198502072006041001

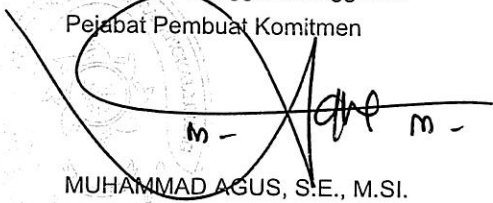
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00008/DRPP/401968/2023
Tanggal : 30 Mei 2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000034-Keperluan Rumah Tangga Kantor	1.410.000,00
	Jumlah	1.410.000,00
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
	401968.015.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000035-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai 40 org)	9.918.567,00
	Jumlah	9.918.567,00
	401968.015.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000042-Pemeliharaan Gedung Kantor	3.164.500,00
2	994.002.0C.000068-Pemeliharaan Taman dan Halaman Kantor	217.000,00
	Jumlah	3.381.500,00
	401968.015.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000043-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	8.023.380,00
2	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	557.475,00
	Jumlah	8.580.855,00
	Jumlah	25.190.922,00

PANGKALPINANG, 30 Mei 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


 MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.
 III/c.198502072006041001

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Mei 2023

Nomor : 00211/PB/401968/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : CV MURAH JAYA

Untuk Pembayaran : Pembelian 1 unit kursi kerja CPNS

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00211/KW/401968/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521252

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



ROSALINA, S.E.

199208082019032017

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



Fanny Ruspanti

KOTA PANGKALPINANG , 19 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.

III/c 198502072006041001

Dicetak pada tanggal 06 Juni 2023

MEMO PERINTAH BAYAR**Tanggal :** 19 Mei 2023**Nomor :** 00211/PB/401968/2023

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Jenis Perintah Bayar : 1 UP

Tahun Anggaran : 2023

NO DIPA : DIPA-005.01.2.401968/2023 Satker Kewenangan

Nama Satker

TGL DIPA : 30 November 2022

401968 Kantor Daerah

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG

BA Unit Es I Program Kegiatan Output

005 01 WA 1066 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI

Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah		
521252	Rp. 950.000,00		
Jumlah Pengeluaran	Rp. 950.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 0,00
			Rp. 950.000,00

Kepada : CV MURAH JAYA

NPWP : 000000000304000

Alamat : Pangkalpinang

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabupaten : KOTA PANGKALPINANG

KOTA PANGKALPINANG , 19 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.

III/c.198502072006041001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 00211/PB/401968/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

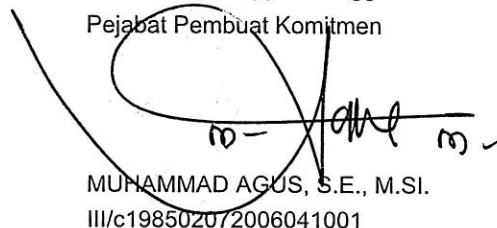
Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	950.000,00
	Jumlah	950.000,00
Jumlah		950.000,00

PANGKALPINANG, 19 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.

III/c198502072006041001

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00211/KW/401968/2023
Akun : 1066-EBA-521252
Kepada : CV MURAH JAYA
Satker : 401968 - PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKAL PINANG

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

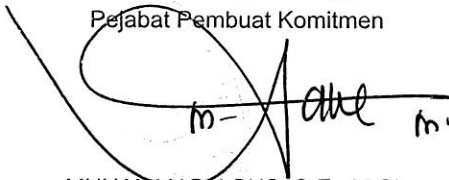
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Jumlah Uang : Rp. 950.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Pembelian 1 unit kursi kerja CPNS

KOTA PANGKALPINANG, 19 Mei 2023
PENERIMA UANG
STAF UMUM DAN KEUANGAN



FANNY RUSPANJI

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.

III/c 198502072006041001

Lunas dibayar, 19 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



ROSALINA, S.E.

199208082019032017

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

[Kode : BEN001]

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor : 00211/KW/401968/2023
Tanggal

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	950.000,00
	Jumlah	950.000,00
Jumlah		950.000,00

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.
III/c 198502072006041001

Tuan PTUN
Toko KOMPLEK PERKANTORAN
PROVINSI

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 SET	KURSI MANAGER		950.000

Tuan PTUN
Toko KOMPLEK PERKANTORAN
PROVINSI

[illegible]

Jumlah Rp. 950.000

CV. MURAH JAYA
FURNITURE
Jl. Aleksander 1, Gedung
Pangsaipinang
0813-7974-8518

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Mei 2023

Nomor : 00212/PB/401968/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : CV MURAH JAYA

Untuk Pembayaran : Pembelian 1 unit meja kerja CPNS

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00212/KW/401968/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521252

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

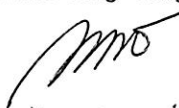


ROSALINA, S.E.

199208082019032017

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

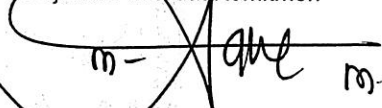


Panny Ruspanti

KOTA PANGKALPINANG , 19 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.

III/c 198502072006041001

Dicetak pada tanggal 06 Juni 2023

MEMO PERINTAH BAYAR**Tanggal :** 19 Mei 2023**Nomor :** 00212/PB/401968/2023

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Jenis Perintah Bayar : 1 UP

Tahun Anggaran : 2023

NO DIPA : DIPA-005.01.2.401968/2023 Satker Kewenangan

Nama Satker

TGL DIPA : 30 November 2022 401968 Kantor Daerah

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKAL PINANG

BA Unit Es I Program Kegiatan Output

005 01 WA 1066 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI

Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah		
521252	Rp. 950.000,00		
Jumlah Pengeluaran	Rp. 950.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 0,00
			Rp. 950.000,00

Kepada : CV MURAH JAYA

NPWP : 000000000304000

Alamat : Pangkalpinang

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabupaten : KOTA PANGKALPINANG

KOTA PANGKALPINANG , 19 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.

III/c 198502072006041001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 00212/PB/401968/2023

Tanggal : 19 Mei 2023

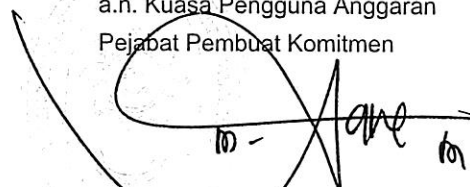
Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	950.000,00
	Jumlah	950.000,00
Jumlah		950.000,00

PANGKALPINANG, 19 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.

III/c198502072006041001

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00212/KW/401968/2023
Akun : 1066-EBA-521252
Kepada : CV MURAH JAYA
Satker : 401968 - PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKAL PINANG

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

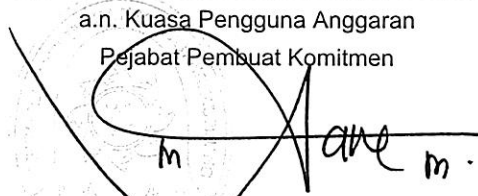
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Jumlah Uang : Rp. 950.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Pembelian 1 unit meja kerja CPNS

KOTA PANGKALPINANG, 19 Mei 2023
PENERIMA UANG
STAF UMUM DAN KEUANGAN



FANNY RUSPANJI

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.SI.
III/c 198502072006041001

Lunas dibayar, 19 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



ROSALINA, S.E.
199208082019032017

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

[Kode : BEN001]

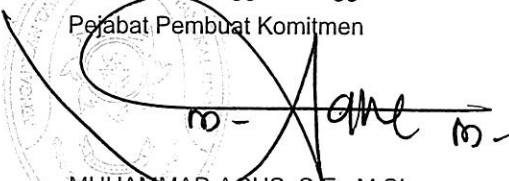
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor : 00212/KW/401968/2023
Tanggal

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	401968.015.521252.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.3051.2.000000.000000	
1	962.051.0A.000066-Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	950.000,00
	Jumlah	950.000,00
Jumlah		950.000,00

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
III/c 198502072006041001

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

UAPB : 005
UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA U

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 30 JUNI 2023		
				BERTAMBAH			BERKURANG					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
131111	Tanah		4,000	25,308,000	0	0	0	0	4,000	25,308,000		
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	4,000	25,308,000	0	0	0	0	4,000	25,308,000		
132111	Peralatan dan Mesin		480	7,045,433,657	6	36,300,000	0	0	486	7,081,733,657		
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	1	110,355,000	0	0	0	0	1	110,355,000		
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	1	223,880,363	0	0	0	0	1	223,880,363		
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	2	49,750,000	0	0	0	0	2	49,750,000		
3020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	-	2	9,787,980	0	0	0	0	2	9,787,980		
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	55	522,265,810	0	0	0	0	55	522,265,810		
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	34	474,709,991	0	0	0	0	34	474,709,991		
3050201	MEUBELAIR	-	253	1,343,715,910	2	1,900,000	0	0	255	1,345,615,910		
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000		
3050204	ALAT PENDINGIN	-	10	2,050,594,144	0	0	0	0	10	2,050,594,144		
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	34	534,015,266	0	0	0	0	34	534,015,266		
3050299	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA	-	2	630,000	0	0	0	0	2	630,000		
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	6	26,922,000	0	0	0	0	6	26,922,000		
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	3	57,414,550	0	0	0	0	3	57,414,550		
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	1	84,662,544	0	0	0	0	1	84,662,544		
3060309	PERALATAN ANTENA UHF	-	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000		
3060310	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	1	8,690,000	0	0	0	0	1	8,690,000		
3060347	SUMBER TENAGA	-	1	498,199,460	0	0	0	0	1	498,199,460		
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	950,000	0	0	0	0	1	950,000		
3070112	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	-	2	2,610,720	0	0	0	0	2	2,610,720		
3070299	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	-	4	6,422,940	0	0	0	0	4	6,422,940		
3090407	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	-	1	905,700	0	0	0	0	1	905,700		
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	10	222,633,733	0	0	0	0	10	222,633,733		
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	30	388,642,200	0	0	0	0	30	388,642,200		
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000		
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	15	26,420,211	4	34,400,000	0	0	19	60,820,211		
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	5	282,429,830	0	0	0	0	5	282,429,830		
3170119	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	-	3	116,575,305	0	0	0	0	3	116,575,305		
133111	Gedung dan Bangunan		2	26,464,419,989	0	0	0	0	2	26,464,419,989		
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	1	26,095,955,463	0	0	0	0	1	26,095,955,463		
4010130	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	1	368,464,526	0	0	0	0	1	368,464,526		
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0	0	2	190,000		
6010101	BUKU	-	2	190,000	0	0	0	0	2	190,000		
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		3	20,290,000	0	0	0	0	3	20,290,000		

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 30/07/23 8:13 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_satker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG					
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	1	6,100,000	0	0	0	0	1	6,100,000
3050201	MEUBELAIR	-	1	4,200,000	0	0	0	0	1	4,200,000
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	1	9,990,000	0	0	0	0	1	9,990,000
TOTAL				33,555,641,646		36,300,000		0		33,591,941,646

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN V

*LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan*

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DAFTAR SATUAN KERJA YANG TERDAPAT KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023

No	Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Presentasi Pengerjaan (%)	Sub Nilai KDP	Total Nilai KDP	Keterangan		
									Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1	401568	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG							NIHIL		

LAMPIRAN VI
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tanggal : 30/07/23 8:06 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_saiker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023		
			Kuantitas		Nilai		BERTAMBAH		BERKURANG				
KODE	URAIAN	3	4	5	6	7	8	9	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2										10		NILAI
													11

LAMPIRAN VII
LAPORAN BARANG
BERSEJARAH

BUKU BARANG BERSEJARAH

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 005.01.3000.401968.000

NAMA SUB SUB :
KODE SUB SUB KEL :

No	Tanggal Pembukuan	Identifikasi Barang			Penambahan/Pengurangan			Jumlah Barang	Satuan Barang	Kondisi Barang			Keterangan
		Tanggal Perolehan	NUP	Merk/Type	T/K Ka/Kk	Kode Transak	Dasar Mutasi			B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah perJumat 30 Juni 2023													

*) Ket : T = Tambah, K = Kurang, Ka = Koreksi aset, Kk = Koreksi kondisi

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop Telp / Fax. (0717) 9111513
Pangkalpinang - Bangka 33148
Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (401968)
SEMESTER I TAHUN 2023
NOMOR : W1.TUN/ 424a /KU.01/6/2023

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-06-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Rosalina, S.E.**
NIP : **199208082019032017**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal per 01 Januari 2023	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	444.500	43.857.279	44.301.779
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	38.400.000	38.400.000
2	Persediaan	444.500	5.457.279	5.901.779
B.	ASET TETAP	31.167.550.592	-902.211.710	30.264.308.882
1	Tanah	25.308.000	0	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.023.570.407	34.400.000	7.057.970.407
3	Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	0	26.464.419.989
4	Aset Tetap Lainnya	190.000	0	190.000
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.830.780.000	-671.833.831	-2.502.613.831
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-516.187.804	-264.777.879	-780.965.683
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	0	20.290.000
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-19.260.000	-1.030.000	-20.290.000
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	31.167.995.092	-858.354.431	30.308.610.661
E	EKSTRAKOMPTABEL	21.863.250	1.900.000	23.763.250
F	TOTAL (D+E)	31.189.858.342	-856.454.431	30.332.373.911

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Asset

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Operator GLP

Rosalina, S.E.
NIP. 199208082019032017

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Romatua Lasma Sembiring, SH
NIP. 197110121992032001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

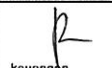
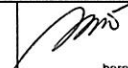
II. PERIODE			
0	6	/	2
			3

UNIT ORGANISASI																							
1. Kode	0	0	5	-	0	1	-	3	0	0	0	-	0	1	9	8	-	0	0	0	-	K	D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,																						

III. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	444.500	444.500	444.500
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	444.500	444.500	444.500
B	ASET TETAP	31.167.550.592	31.167.550.592	31.167.550.592
1	Tanah	25.308.000	25.308.000	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.023.570.407	7.023.570.407	7.023.570.407
3	Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	26.464.419.989	26.464.419.989
4	Aset tetap lainnya	190.000	190.000	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.830.780.000	-1.830.780.000	-1.830.780.000
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-516.187.804	-516.187.804	-516.187.804
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	20.290.000	20.290.000
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-19.260.000	-19.260.000	-19.260.000
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	31.167.995.092	31.167.995.092	31.167.995.092
E	EKSTRAKOMPTABEL	21.863.250	21.863.250	21.863.250
F	TOTAL (D + E)	31.189.858.342	31.189.858.342	31.189.858.342

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	444.500	0	0	444.500
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	444.500	0	0	444.500
B	ASET TETAP	31.167.550.592	0	0	31.167.550.592
1	Tanah	25.308.000	0	0	25.308.000
2	Peralatan dan Mesin	7.023.570.407	0	0	7.023.570.407
3	Gedung dan Bangunan	26.464.419.989	0	0	26.464.419.989
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.830.780.000	0	0	-1.830.780.000
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-516.187.804	0	0	-516.187.804
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20.290.000	0	0	20.290.000
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-19.260.000	0	0	-19.260.000
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	31.167.995.092	0	0	31.167.995.092
E	EKSTRAKOMPTABEL	21.863.250	0	0	21.863.250
F	TOTAL (D + E)	31.189.858.342	0	0	31.189.858.342

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
0 6 / 2 3	

UNIT ORGANISASI																							
1. Kode	0	0	5	-	0	1	-	3	0	0	0	0	1	9	6	8	-	0	0	0	-	K	D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,																						

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN						
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0	44.617.279
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	38.400.000	0	0	38.400.000
2	Persediaan	0	6.217.279	0	0	6.217.279
B.	ASET TETAP	14.550.000	0	0	0	14.550.000
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	14.550.000	0	0	0	14.550.000
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	14.550.000	0	0	0	59.167.279
E	EKSTRAKOMPTABEL	0	1.900.000	0	0	1.900.000
F	TOTAL (D+E)	14.550.000	0	0	0	61.067.279

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.0,-

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

NIHIL

LAMPIRAN IX

*Laporan Persediaan dan
BA Opname Fisik*



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN

(OPNAME FISIK)

Nomor : W15-TUN5/ 423b /KU.01/06/2023

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 401968
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Rosalina, S.E. (Kasubbag PTIP)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Bendahara).
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

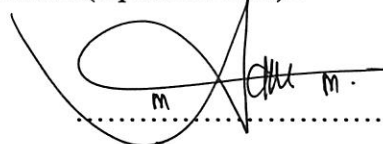
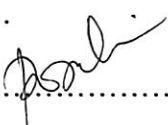
Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si.

2. Nama : Rosalina,S.E.

3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.


.....

.....

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Romatua Lasma Sembiring,SH
NIP. 197110121992032001



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan

Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33148

Telp / Fax. (0717) 9111513

Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Kode Satker : 005013000401968000KD.

UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG.

UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI.

No.	Kode Barang	Nama Barang	KUANTITAS BARANG		Selisih *)	Kondisi	
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang
1	1010301001000020	Pena Tanda Tangan	8	8	0	√	-
2	1010302001000002	Kertas Hvs A4	5	5	0	√	-
3	1010302001000005	Kertas A3	1	1	0	√	-
4	1010302002000002	Kertas Kambing	1	1	0	√	-
5	1010303999000004	Akrylix	1	1	0	√	-
6	1010303999000008	CatRidge Hitam	1	1	0	√	-
7	1010303999000018	Catridge HP Black	1	1	0	√	-
8	1010303999000019	Catridge HP Warna	1	1	0	√	-
9	1010304006000001	Flash Disk	1	1	0	√	-
10	1010305008000019	pembersih kaca 2	6	6	0	√	-
11	1010305008000028	Pembersh WC	2	2	0	√	-
12	1010305008000032	Pengharum pakaian	36	36	0	√	-
13	1010305012000001	Pengharum Ruangan	4	4	0	√	-
14	1010305999000058	Papan Nama	4	4	0	√	-
15	1010305999000059	Akrilic	3	3	0	√	-
16	1010305999000060	Papan Mading	2	2	0	√	-
17	1010306010000002	Batu Baterai	2	2	0	√	-
18	1010306010000003	Baterai AAA	8	8	0	√	-
19	1010306010000012	Baterai AA	21	21	0	√	-
20	1010309999000004	Catridge warna	3	3	0	√	-
21	1010309999000022	Spanduk 3,1 X 1,3	1	1	0	√	-
22	1010309999000024	Lem Korea	1	1	0	√	-
23	1010399999000001	tissue	2	2	0	√	-
24	1010399999000002	Materai 10000	50	50	0	√	-
25	1010399999000004	Kotak Tissue	1	1	0	√	-
26	1010399999000006	Permen	5	5	0	√	-
27	1010399999000016	Teh	2	2	0	√	-
28	1010399999000058	Tissue besar	12	12	0	√	-
29	1010399999000065	Gula	1	1	0	√	-
30	1010399999000070	Sabun Tangan 1	1	1	0	√	-
31	1010399999000077	Tissu tangan	4	4	0	√	-
32	1010399999000081	Tissu Toilet	4	4	0	√	-

32	1010399999000092	Bingkai A4	18	18	0	√	-
33	1010399999000093	Pemotong Kertas	1	1	0	√	-

Tim Pelaksana Stock Opname :

1. MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
2. ROSALINA, S.E.
3. FANNY RUSPANJI, S.E.I.

Handwritten signature 'ms' and 'Doli' on lined paper. The signature 'ms' is on the left, and 'Doli' is on the right, both written in cursive.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA BARANG

ROMATUA LASMA SEMBIRING, S.H.
NIP. 197110121992032001



LAMPIRAN X

*LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA*

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 30/07/23 6:00 PM
Tgl.Cetak : 30/07/23 8:03 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	5,355,519
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	546,260
131111	Tanah	25,308,000
132111	Peralatan dan Mesin	7,057,970,407
133111	Gedung dan Bangunan	26,464,419,989
135121	Aset Tetap Lainnya	190,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,502,613,831)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(780,965,683)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	20,290,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(20,290,000)
J U M L A H		30,270,210,661

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 30/07/23 8:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	38,400,000	0	38,400,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	1,248,750	(1,248,750)	(100.00)
Persediaan	5,901,779	444,500	5,457,279	1,227.73
JUMLAH ASET LANCAR	44,301,779	1,693,250	42,608,529	2,516.38
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,057,970,407	7,023,570,407	34,400,000	0.49
Gedung dan Bangunan	26,464,419,989	26,464,419,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,283,579,514)	(2,346,967,804)	(936,611,710)	39.91
JUMLAH ASET TETAP	30,264,308,882	31,166,520,592	(902,211,710)	(2.89)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(20,290,000)	(19,260,000)	(1,030,000)	5.35
JUMLAH ASET LAINNYA	0	1,030,000	(1,030,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	30,308,610,661	31,169,243,842	(860,633,181)	(2.76)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	182,799,675	16,204,687	166,594,988	1,028.07
Utang Yang Belum Ditagihkan	20,734,224	0	20,734,224	0.00
Uang Muka dari KPPN	38,400,000	0	38,400,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	241,933,899	16,204,687	225,729,212	1,392.99
JUMLAH KEWAJIBAN	241,933,899	16,204,687	225,729,212	1,392.99
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH EKUITAS	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH EKUITAS	30,066,676,762	31,153,039,155	(1,086,362,393)	(3.49)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,308,610,661	31,169,243,842	(860,633,181)	(2.76)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 30/07/23 8:26 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Pangkalpinang, 30 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH

197110121992032001

LAMPIRAN XI
LAPORAN HIBAH

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2023

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET
1	401968	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang				NIHIL	

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Barang


Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 19711012 199203 2 001

LAMPIRAN XII

LAPORAN PENYUSUTAN

BMN

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tgl Cetak : 30/07/23 7:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO 30 JUNI 2023					AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU	
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI		SALDO AWAL		BEBAN PENYUSUTAN		KOREKSI	TOTAL		
						5	6	7	8	9=6+7+8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9						
131111	Tanah		4,000	25,308,000	0	0	0	0	25,308,000					25,308,000	
20101	TANAH PERSIL	-	4,000	25,308,000	0	0	0	0	25,308,000					25,308,000	
132111	Peralatan dan Mesin		443	7,057,970,407	(1,830,780,000)	(671,833,831)	0	(2,502,613,831)	4,555,356,576					4,555,356,576	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	383,985,363	(266,715,210)	(19,545,027)	0	(286,260,237)	97,725,126					97,725,126	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	2	9,787,980	(2,446,996)	(4,893,990)	0	(4,893,990)	4,893,990					4,893,990	
30501	ALAT KANTOR	-	88	996,075,801	(177,495,449)	(99,607,580)	0	(277,103,029)	718,972,772					718,972,772	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	274	3,918,830,320	(772,314,149)	(391,883,033)	0	(1,164,197,182)	2,754,633,138					2,754,633,138	
30601	ALAT STUDIO	-	6	83,004,000	(27,942,000)	(8,300,400)	0	(36,242,400)	46,761,600					46,761,600	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	84,662,544	(16,932,508)	(8,466,255)	0	(25,398,763)	59,263,781					59,263,781	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	3	507,989,460	(50,798,946)	(25,399,473)	0	(76,198,419)	431,791,041					431,791,041	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	2,610,720	(261,072)	(261,072)	0	(522,144)	2,088,576					2,088,576	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	4	6,422,940	(642,294)	(642,294)	0	(1,284,588)	5,138,352					5,138,352	
31001	KOMPUTER UNIT	-	40	611,275,933	(275,971,609)	(69,538,242)	0	(345,509,851)	265,766,082					265,766,082	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	16	336,750,041	(224,687,853)	(38,457,504)	0	(263,145,357)	73,604,684					73,604,684	
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	3	116,575,305	(14,571,914)	(7,285,957)	0	(21,857,871)	94,717,434					94,717,434	
133111	Gedung dan Bangunan		2	26,464,419,989	(516,187,804)	(264,777,879)	0	(780,965,683)	25,683,454,306					25,683,454,306	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	2	26,464,419,989	(516,187,804)	(264,777,879)	0	(780,965,683)	25,683,454,306					25,683,454,306	
135121	Aset Tetap Lainnya		2	190,000	0	0	0	0	190,000					190,000	
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	2	190,000	0	0	0	0	190,000					190,000	
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		3	20,290,000	(19,260,000)	(1,030,000)	0	(20,290,000)	0					0	
30501	ALAT KANTOR	-	1	6,100,000	(5,490,000)	(610,000)	0	(6,100,000)	0					0	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1	4,200,000	(3,780,000)	(420,000)	0	(4,200,000)	0					0	
31001	KOMPUTER UNIT	-	1	9,990,000	(9,990,000)	0	0	(9,990,000)	0					0	
JUMLAH			4,450	33,568,178,396	(2,366,227,804)	(937,641,710)	0	(3,303,869,514)	30,264,308,882					30,264,308,882	

Pangkalpinang, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris

Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP 197110121992032001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPB : 005

UAKPB : 401968

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 30/07/23 7:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 30 JUNI 2023				
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			TOTAL	NILAI BUKU
1	2			6	7	8		
132111	Peralatan dan Mesin	43	23,763,250	(9,614,318)	(2,566,467)	0	(12,180,785)	11,582,465
30501	ALAT KANTOR	1	900,000	(450,000)	(90,000)	0	(540,000)	360,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	28	12,975,000	(5,157,500)	(1,297,500)	0	(6,455,000)	6,520,000
30601	ALAT STUDIO	3	1,332,550	(290,755)	(133,255)	0	(424,010)	908,540
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	950,000	(475,000)	(95,000)	0	(570,000)	380,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	905,700	(566,063)	(113,212)	0	(679,275)	226,425
31002	PERALATAN KOMPUTER	9	6,700,000	(2,675,000)	(837,500)	0	(3,512,500)	3,187,500
JUMLAH		43	23,763,250	(9,614,318)	(2,566,467)	0	(12,180,785)	11,582,465

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris



Romatua Lasma Sembiring, S.H.

NIP 197110121992032001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 30/07/23 6:00 PM
Tanggal : 30/07/23 7:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_saker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2023				
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI
					AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI
1	2	3	4	5	6	7
					8	9=7+8
						10=5-9